

ABSTRAK

ARIYAH (01656200109)

Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Yang Bersumber Dari Dokumen Penghadap Yang Menyesatkan (Studi Putusan PK Nomor 20 Pk/Pid/2020)

(vi + 113 halaman; 1 tabel)

Notaris dalam menjalankan jabatannya, seringkali mendapat permasalahan hukum. Persoalan hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tetapi juga berimplikasi pada akta itu sendiri. Penilaian terhadap akta Notaris dapat dilakukan dengan menggunakan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*). Asas ini menilai bahwa akta Notaris harus tetap dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga akta Notaris tetap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapa saja yang berkepentingan atas akta tersebut serta tetap mematuhi. Dalam proses hukum, Notaris dapat memperoleh perlindungan, Notaris tidak dapat dituntut atau diproses secara pidana atau perdata karena telah memenuhi tugasnya sebagai notaris dalam keadaan yang sah, kecuali jika terdapat bukti yang cukup menunjukkan bahwa Notaris tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang membahayakan kepentingan pihak yang bersangkutan. Notaris dapat mempertahankan diri dengan membuktikan bahwa ia telah memenuhi tugasnya sebagai Notaris dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang terjadi dalam Putusan PK Nomor 20 Pk/Pid/2020, Notaris dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan peninjauan kembali ini sangat jauh berbeda dengan putusan sebelumnya, jika pada putusan pertama Notaris dinyatakan melakukan tindak pidana karena telah melakukan rangkaian kebohongan dan lalai untuk menggali kebenaran materil dari dokumen yang diajukan penghadap, sedangkan dalam putusan Peninjauan kembali perbuatan Notaris tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Notaris dari segala tuntutan, Notaris terbukti sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akta jual beli tanah tersebut, jika terdapat tindakan Notaris yang telah lalai dalam proses membuat akta kuasa menjual tanah, hal tersebut merupakan ranah administratif selaku Notaris bukan ranah pidana, justru Notaris menjadi korban atas suatu dokumen penghadap yang menyesatkan.

Referensi: 56 (1982-2023)

Kata Kunci: Notaris, Dokumen menyesatkan, Akta Autentik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

ARIYAH (01656200109)

Notary's Responsibility for Deeds Sourced from Misleading Facing Documents (PK Decision Study Number 20 Pk/Pid/2020)

(vi + 113 pages; 1 table)

Notaries in carrying out their positions often encounter problems in the legal realm. This legal dispute certainly does not only have implications for the notary who made the deed, but also has implications for the deed itself. Evaluation of notarial deeds can be carried out using the principle of presumption of validity (vermoeden van rechtmatigheid). This principle considers that a notarial deed must remain considered valid until a court decision has permanent legal force, so that the notarial deed remains valid and binding for the parties or anyone who has an interest in the deed and continues to comply with it. In the legal process, a notary can obtain protection, a notary cannot be sued or prosecuted criminally or civilly because he has fulfilled the requirements as a notary in a legal condition, unless there is sufficient evidence to show that the notary made an error or negligence that endangered the interests of the party concerned. A notary can defend himself by proving that he has fulfilled the requirements as a notary in good faith and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. As happened in PK Decision Number 20 Pk/Pid/2020, the notary applied Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 Paragraph (2) of the Criminal Code. This review decision is very different from the previous decision, if in the first decision the notary was declared to have committed a criminal act because he had carried out a series of certificates and failed to explore the material truth of the documents submitted by the court, whereas in the review decision the notary's actions were not an action. the notary's criminal act. and releasing the notary from all claims, the notary is proven to have made no profit at all from the transaction of making the power of attorney for the land sale and purchase deed, if there is an action by the notary who has been negligent in the process of making the power of attorney deed to sell land, this is in the realm of administration as a notary, not the realm of crime In fact, the Notary became a victim of a crowd of documents.

References : 56 (1982-2023)

Keywords : Notary, Misleading document, Authentic Deed, Legal Protection